



Rancangan Akhir **PERUBAHAN** **RENJA** **Perangkat Daerah** **2025** **Provinsi** **Kalimantan** **Selatan**

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa


Geopark
Meratus

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perangkat daerah teknis dalam Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan di Kalimantan Selatan, sehingga diharapkan Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor yang menyumbangkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) untuk masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Selatan. Keberhasilan – keberhasilan pembangunan untuk sektor Kelautan dan Perikanan terus diupayakan dan terus ditingkatkan guna Kesejahteraan para pegiat Kelautan dan Perikanan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kami susun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran tentang Rencana pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan diselenggarakan selama 1 (satu) tahun berjalan yaitu tahun 2025, dan juga sebagai acuan / tolak ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.



Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini semoga dapat dijadikan pedoman semua pihak yang terkait Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Banjarbaru, Mei 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan

RUSDI HARTONO, S.Pi, MP
NIP. 19720426 199703 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Triwulan 1 Tahun 2025)	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	46
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	53
BAB IV PENUTUP	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	6
Tabel 2.2	Review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023-2024.....	37
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	51
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, yang didalamnya mencakup periode tahunan.

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini akan menggambarkan Program dan Kegiatan beserta Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 dalam rangka mendukung terhadap Visi, Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing Program dan Kegiatan tersebut merupakan komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dicapai pada tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 166);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
 - i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen-Kp/2020 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Ikan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 291);



- j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020, tentang penetapan Kawasan Konservasi Perairan Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap, dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Selatan;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan Selatan;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042;
- r. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017);
- s. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0124 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 124);



- t. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 nomor 4);
- v. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0414/KUM/2022 tentang Penetapan Daftar Komoditas Perikanan Strategis Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dihibahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- w. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Tanggal 28 Mei 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 17).
- x. Aturan SPM;
- y. Aturan sektoral.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perubahan perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode Tahun 2025, serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah untuk menjamin dan memastikan konsistensi keberlanjutan Program, Kegiatan dan Anggaran dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.



1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Triwulan I Tahun 2025)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

DAFTAR TABEL



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Triwulan 1 Tahun 2025)

Pada Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I disampaikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang didalamnya memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Sampai dengan Tahun Berjalan (2025) dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Triwulan 1 Tahun 2025)



FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN I

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab							
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16							
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan					100	Poin	38.747.017.719	25	Poin	8.041.915.443	50	Poin	17.869.518.967	0	Poin	0	0	Poin	0	50	Poin	17.869.518.967	50	46.12	50	Poin	17.869.518.967	50	46.12	
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)					100	%	1.845.156.800	20	%	452.489.340	40	%	954.332.776	0	%	0	0	%	0	40	%	954.332.776	40	51.72	40	%	954.332.776	40	51.72	
		X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10	Dokumen	676.535.300	2	Dokumen	338.356.960	4	Dokumen	432.593.576	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	4	Dokumen	432.593.576	40	63.94	4	Dokumen	432.593.576	40	63.94	
		X.XX.01.1.01.08 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					1	Data	512.439.900	0	Data	56.345.720	0	Data	378.429.900	0	Data	0	0	Data	0	0	Data	378.429.900	0	73.85	0	Data	378.429.900	0	73.85	
		X.XX.01.1.01.10 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah					2	Dokumen	656.181.600	0	Dokumen	57.786.660	0	Dokumen	143.309.300	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	143.309.300	0	21.84	0	Dokumen	143.309.300	0	21.84	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				13.33	53.21												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				SR	R												
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait					100	%	29.703.196.789	41.66	%	6.007.774.068	50	%	13.568.853.184	0	%	0	0	%	0	50	%	13.568.853.184	50	45.68	50	%	13.568.853.184	50	45.68	
		X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					145	Orang/Bulan	29.082.893.589	145	Orang/Bulan	5.880.545.848	145	Orang/Bulan	13.271.791.794	0	Orang/Bulan	0	0	Orang/Bulan	0	145	Orang/Bulan	13.271.791.794	100	45.63	145	Orang/Bulan	13.271.791.794	100	45.63	
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	Dokumen	616.303.200	3	Dokumen	123.952.220	6	Dokumen	293.785.390	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	Dokumen	293.785.390	50	47.67	6	Dokumen	293.785.390	50	47.67	
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	3.276.000	1	Laporan	3.276.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	3.276.000	100	81.9	1	Laporan	3.276.000	100	81.9	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				83.33	58.4												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				T	R												
		X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas dan UPTD yang dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukkan/masterplan yang telah ditetapkan					100	%	119.963.400	20.48	%	24.568.920	50	%	48.085.840	0	%	0	0	%	0	50	%	48.085.840	50	40.08	50	%	48.085.840	50	40.08	
		X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2	Laporan	119.963.400	0	Laporan	24.568.920	1	Laporan	48.085.840	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	48.085.840	50	40.08	1	Laporan	48.085.840	50	40.08	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				50	40.08												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				SR	SR												
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku					100	%	1.230.573.700	49.91	%	303.993.216	75.56	%	465.408.136	0	%	0	0	%	0	75.56	%	465.408.136	75.56	37.82	75.56	%	465.408.136	75.56	37.82	
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					3	Paket	204.000.000	1	Paket	71.000.000	3	Paket	197.748.000	0	Paket	0	0	Paket	0	3	Paket	197.748.000	100	96.94	3	Paket	197.748.000	100	96.94	
		X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1	Dokumen	93.755.000	0	Dokumen	40.400.000	0	Dokumen	47.550.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	47.550.000	0	50.72	0	Dokumen	47.550.000	0	50.72	
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					520	Orang	168.752.700	200	Orang	57.076.920	300	Orang	77.093.840	0	Orang	0	0	Orang	0	300	Orang	77.093.840	57.69	45.68	300	Orang	77.093.840	57.69	45.68	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																																	

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab			
					I	II		III	IV	12	13	14	15	16																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)												
		3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil			100	%	1.753.681.650	17.95	%	314.842.526	51.33	%	900.212.926	0	%	0	0	%	0	51.33	%	900.212.926	51.33	51.33	%	900.212.926	51.33	51.33		
		3.25.05.1.01.08 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani			6	Perkara	461.193.000	0	Perkara	92.292.230	3	Perkara	157.053.040	0	Perkara	0	0	Perkara	0	3	Perkara	157.053.040	50	34.05	3	Perkara	157.053.040	50	34.05	
		3.25.05.1.01.14 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi			4	Pelaku Usaha	268.088.000	1	Pelaku Usaha	103.011.476	3	Pelaku Usaha	156.369.786	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	3	Pelaku Usaha	156.369.786	75	58.33	3	Pelaku Usaha	156.369.786	75	58.33	
		3.25.05.1.01.16 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi			4	Pelaku Usaha	23.080.000	0	Pelaku Usaha	0	2	Pelaku Usaha	9.320.000	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	2	Pelaku Usaha	9.320.000	50	40.38	2	Pelaku Usaha	9.320.000	50	40.38	
		3.25.05.1.01.17 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan			10	Kelompok Masyarakat	1.001.320.650	0	Kelompok Masyarakat	119.538.820	6	Kelompok Masyarakat	577.470.100	0	Kelompok Masyarakat	0	0	Kelompok Masyarakat	0	6	Kelompok Masyarakat	577.470.100	60	57.67	6	Kelompok Masyarakat	577.470.100	60	57.67	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																		58.75	47.61												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		R	SR												
		3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dilintas kabupaten/kota			100	%	288.555.000	6.42	%	18.551.500	25.89	%	74.722.308	0	%	0	0	%	0	25.89	%	74.722.308	25.89	25.9	%	74.722.308	25.89	25.9		
		3.25.05.1.02.04 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi			4	Pelaku Usaha	14.560.000	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	1.238.000	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	1.238.000	0	8.5	0	Pelaku Usaha	1.238.000	0	8.5	
		3.25.05.1.02.05 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi			2	Pelaku Usaha	262.355.000	0	Pelaku Usaha	18.551.500	0	Pelaku Usaha	71.696.808	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	71.696.808	0	27.33	0	Pelaku Usaha	71.696.808	0	27.33	
		3.25.05.1.02.06 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi			2	Pelaku Usaha	11.640.000	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	1.787.500	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	1.787.500	0	15.36	0	Pelaku Usaha	1.787.500	0	15.36	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																		0	17.06												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		SR													
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		38.61	38.61												
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR												
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi Ikan masyarakat			65	Kg/Kap/Thn	1.610.685.125	16.37	Kg/Kap/Thn	294.311.880	16.37	Kg/Kap/Thn	460.797.800	0	Kg/Kap/Thn	0	0	Kg/Kap/Thn	0	16.37	Kg/Kap/Thn	460.797.800	25.18	28.61	16.37	Kg/Kap/Thn	460.797.800	25.18	28.61	
		3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			15	%	84.369.000	0	%	0	3.65	%	20.554.000	0	%	0	0	%	0	3.65	%	20.554.000	24.33	24.36	3.65	%	20.554.000	24.33	24.36	
		3.25.06.1.01.04 Penyediaan Data dan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor			2	Dokumen	84.369.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	20.554.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	20.554.000	50	24.36	1	Dokumen	20.554.000	50	24.36	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																															
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																															

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/ d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab												
								I		II		III		IV																								
1	2	3	4	5	K	Rp (Ribu)	6	K	Rp (Ribu)	7	K	Rp (Ribu)	8	K	Rp (Ribu)	9	K	Rp (Ribu)	10	K	Rp (Ribu)	11	K	Rp (Ribu)	12	K	Rp (Ribu)	13	K (%)	Rp (%)	14	K	Rp (Ribu)	15	K	Rp (Ribu)	16	
		Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko																																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												50	24.36									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR									
		3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan				100	%	1.526.316.125	19.28	%	294.311.880	28.84	%	440.243.800	0	%	0	0	%	0	28.84	%	440.243.800	28.84	28.84	28.84	%	440.243.800	28.84	28.84							
		3.25.06.1.02.03 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				8	Kegiatan	1.292.850.500	2	Kegiatan	233.067.080	2	Kegiatan	357.994.000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	2	Kegiatan	357.994.000	25	27.69	2	Kegiatan	357.994.000	25	27.69							
		3.25.06.1.02.04 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2	Kegiatan	233.465.625	1	Kegiatan	61.244.800	1	Kegiatan	82.249.800	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	82.249.800	50	35.23	1	Kegiatan	82.249.800	50	35.23							
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												37.5	31.46									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												26.59	26.6									
Predikat Kinerja Kegiatan																												SR	SR									
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program										53.733.509.469			11.016.679.623			24.011.317.207		0		0		24.011.317.207			24.011.317.207			24.011.317.207										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																												54.95	37.91									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																												R	SR									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																																						



**BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Dukungan SDM yang memadai
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Optimalisasi Sumber Daya yang tersedia

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025				Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab
										I				II				III				IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16									
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)										
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan					100	%	179.376.000	25	%	66.532.999	50	%	88.124.525	0	%	89.942.355	0	%	0	50	%	89.942.355	50	50.14	50	%	89.942.355	50	50.14			
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	10.000.000	0	Paket	0	2	Paket	1.764.500	2	Paket	1.764.500	0	Paket	0	2	Paket	1.764.500	16.67	17.65	2	Paket	1.764.500	16.67	17.65			
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	40.000.000	3	Paket	9.389.300	6	Paket	13.020.700	7	Paket	14.078.530	0	Paket	0	7	Paket	14.078.530	58.33	35.2	7	Paket	14.078.530	58.33	35.2			
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	Paket	26.536.000	1	Paket	0	3	Paket	5.250.000	4	Paket	5.250.000	0	Paket	0	4	Paket	5.250.000	33.33	19.78	4	Paket	5.250.000	33.33	19.78			
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	14.000.000	3	Paket	3.325.000	6	Paket	5.162.500	7	Paket	5.162.500	0	Paket	0	7	Paket	5.162.500	58.33	36.88	7	Paket	5.162.500	58.33	36.88			
		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Dokumen	3.000.000	3	Dokumen	500.000	6	Dokumen	1.500.000	7	Dokumen	1.500.000	0	Dokumen	0	7	Dokumen	1.500.000	58.33	50	7	Dokumen	1.500.000	58.33	50			
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	85.840.000	3	Laporan	53.318.699	6	Laporan	61.426.825	7	Laporan	62.186.825	0	Laporan	0	7	Laporan	62.186.825	58.33	72.45	7	Laporan	62.186.825	58.33	72.45			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					47.22	38.66													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR	SR													
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah memanfaatkan untuk menunjang layanan kantor					100	%	258.500.000	21.75	%	22.100.000	69.56	%	129.399.000	0	%	227.217.750	0	%	0	69.56	%	227.217.750	69.56	87.9	69.56	%	227.217.750	69.56	87.9			
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					23	Unit	258.500.000	5	Unit	22.100.000	16	Unit	129.399.000	21	Unit	227.217.750	0	Unit	0	21	Unit	227.217.750	91.3	87.9	21	Unit	227.217.750	91.3	87.9			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					91.3	87.9													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					ST	T													
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan					100	%	491.066.300	25	%	100.609.525	50	%	209.860.426	0	%	228.655.019	0	%	0	50	%	228.655.019	50	46.56	50	%	228.655.019	50	46.56			
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Laporan	6.000.000	3	Laporan	1.100.000	6	Laporan	2.578.000	7	Laporan	2.578.000	0	Laporan	0	7	Laporan	2.578.000	58.33	42.97	7	Laporan	2.578.000	58.33	42.97			
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	155.000.000	3	Laporan	24.267.665	6	Laporan	49.313.606	7	Laporan	58.352.979	0	Laporan	0	7	Laporan	58.352.979	58.33	37.65	7	Laporan	58.352.979	58.33	37.65			
		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	330.066.300	3	Laporan	75.241.860	6	Laporan	157.968.820	7	Laporan	167.724.040	0	Laporan	0	7	Laporan	167.724.040	58.33	50.82	7	Laporan	167.724.040	58.33	50.82			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					58.33	43.81													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					R	SR													
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya					100	%	314.940.000	25	%	16.106.900	50	%	153.995.010	0	%	159.648.010	0	%	0	50	%	159.648.010	50	50.69	50	%	159.648.010	50	50.69			
		X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan					5	Unit	123.400.000	1	Unit	16.106.900	3	Unit	44.822.010	3	Unit	50.475.010	0	Unit	0	3	Unit	50.475.010	60	40.9	3	Unit	50.475.010	60	40.9			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Dukungan SDM yang memadai																																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Optimalisasi Sumber Daya yang tersedia																																			

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sambil Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab							
							I				II				III				IV															
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10			11			12			13		14				15		16
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan					100	Poin	1.395.300.100	25	Poin	229.186.247	50	Poin	745.348.397	0	Poin	0	0	Poin	0	50	Poin	745.348.397	50	53.42	50	Poin	745.348.397	50	53.42		
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait					100	%	108.744.000	25	%	27.155.220	50	%	54.310.440	0	%	0	0	%	0	50	%	54.310.440	50	49.94	50	%	54.310.440	50	49.94		
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	Dokumen	108.744.000	3	Dokumen	27.155.220	6	Dokumen	54.310.440	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	Dokumen	54.310.440	50	49.94	6	Dokumen	54.310.440	50	49.94		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								50	49.94									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR									
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan					100	%	159.944.500	25	%	60.092.850	50	%	88.790.448	0	%	0	0	%	0	50	%	88.790.448	50	55.51	50	%	88.790.448	50	55.51		
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	13.946.500	3	Paket	1.594.500	6	Paket	13.237.500	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	13.237.500	50	94.92	6	Paket	13.237.500	50	94.92		
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	21.223.600	3	Paket	0	6	Paket	2.815.077	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	2.815.077	50	13.26	6	Paket	2.815.077	50	13.26		
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	Paket	23.800.000	3	Paket	3.778.450	6	Paket	7.646.700	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	7.646.700	50	32.13	6	Paket	7.646.700	50	32.13		
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	4.999.400	2	Paket	0	6	Paket	2.195.025	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	2.195.025	50	43.91	6	Paket	2.195.025	50	43.91		
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	95.975.000	3	Laporan	54.719.900	6	Laporan	62.896.146	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	62.896.146	50	65.53	6	Laporan	62.896.146	50	65.53		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								50	49.95									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR									
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor					100	%	294.780.000	25	%	0	50	%	282.900.000	0	%	0	0	%	0	50	%	282.900.000	50	95.97	50	%	282.900.000	50	95.97		
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5	Unit	294.780.000	0	Unit	0	5	Unit	282.900.000	0	Unit	0	0	Unit	0	5	Unit	282.900.000	100	95.97	5	Unit	282.900.000	100	95.97		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								100	95.97									

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025				Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14				15		16
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			
		Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																									
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100	41.74							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	SR							
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				50	39.86							
Predikat Kinerja Kegiatan																				SR	SR							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program										3.907.541.740			546.935.866			1.762.417.329		0		0		1.762.417.329			1.762.417.329			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																				52.79	46.95							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																				R	SR							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																												
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																												



No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i> / Kegiatan <i>(Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)</i>	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab												
							I	II	III	IV																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)												
		X.XX.01 PROGRAM PENUNDA NG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			100	Poin	4.964.242.800	25	Poin	834.759.648	50	Poin	2.001.647.886	0	Poin	0	0	Poin	0	50	Poin	2.001.647.886	50	40.32	50	Poin	2.001.647.886	50	40.32	
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable,Achievable, Relevant dan Timebound)			100	%	166.719.400	25	%	37.740.000	50	%	79.024.040	0	%	0	0	%	0	50	%	79.024.040	50	47.4	50	%	79.024.040	50	47.4	
		X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			12	Dokumen	45.746.400	3	Dokumen	9.435.000	6	Dokumen	20.287.960	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	Dokumen	20.287.960	50	44.35	6	Dokumen	20.287.960	50	44.35	
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12	Laporan	120.973.000	3	Laporan	28.305.000	6	Laporan	58.736.080	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	58.736.080	50	48.55	6	Laporan	58.736.080	50	48.55	
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								50	46.45									
													Predikat Kinerja Sub Kegiatan								SR	SR									
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait			100	%	342.563.100	25	%	71.495.000	50	%	168.411.220	0	%	0	0	%	0	50	%	168.411.220	50	49.16	50	%	168.411.220	50	49.16	
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	Dokumen	222.315.600	3	Dokumen	43.190.000	6	Dokumen	110.385.340	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	Dokumen	110.385.340	50	49.65	6	Dokumen	110.385.340	50	49.65	
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12	Laporan	120.247.500	3	Laporan	28.305.000	6	Laporan	58.025.880	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	58.025.880	50	48.26	6	Laporan	58.025.880	50	48.26	
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								50	48.96									
													Predikat Kinerja Sub Kegiatan								SR	SR									
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku			100	%	188.211.000	25	%	68.165.000	50	%	107.792.840	0	%	0	0	%	0	50	%	107.792.840	50	57.27	50	%	107.792.840	50	57.27	
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			2	Paket	31.635.000	2	Paket	30.425.000	2	Paket	30.425.000	0	Paket	0	0	Paket	0	2	Paket	30.425.000	100	96.18	2	Paket	30.425.000	100	96.18	
		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			26	Orang	156.576.000	0	Orang	37.740.000	0	Orang	77.367.840	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	77.367.840	0	49.41	0	Orang	77.367.840	0	49.41	
													Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								50	72.8									
													Predikat Kinerja Sub Kegiatan								SR	S									

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab	
							I				II				III				IV									
							K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)							K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
			layanan umum kantor yang telah diberikan																									
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	88.461.500	0	Paket	0	12	Paket	78.915.000	0	Paket	0	0	Paket	0	12	Paket	78.915.000	100	89.21	
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	53.527.800	0	Paket	0	6	Paket	10.228.000	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	10.228.000	50	19.11	
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	Paket	123.318.600	3	Paket	1.480.450	6	Paket	71.240.550	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	71.240.550	50	57.77	
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	36.704.800	3	Paket	4.704.600	6	Paket	14.127.400	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	14.127.400	50	38.49	
		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	Dokumen	9.600.000	3	Dokumen	1.600.000	6	Dokumen	3.200.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	Dokumen	3.200.000	50	33.33	
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	274.601.000	3	Laporan	89.198.619	6	Laporan	110.348.619	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	110.348.619	50	40.19	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					58.33	46.35						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					R	SR						
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor					100	%	233.166.600	25	%	46.035.000	50	%	129.985.000	0	%	0	0	%	0	50	%	129.985.000	50	55.75	
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2	Unit	68.997.600	0	Unit	0	2	Unit	64.600.000	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	64.600.000	100	93.63	
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					12	Unit	164.169.000	1	Unit	46.035.000	4	Unit	65.385.000	0	Unit	0	0	Unit	0	4	Unit	65.385.000	33.33	39.83	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					66.67	66.73						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					S	S						
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan					100	%	1.593.403.000	25	%	253.830.979	50	%	585.368.137	0	%	0	0	%	0	50	%	585.368.137	50	36.74	
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Laporan	85.188.000	3	Laporan	19.445.000	6	Laporan	40.983.920	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	40.983.920	50	48.11	
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	1.261.575.000	3	Laporan	217.503.979	6	Laporan	450.327.217	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	450.327.217	50	35.7	
		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	246.640.000	3	Laporan	16.882.000	6	Laporan	94.057.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	94.057.000	50	38.14	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					50	40.65						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR	SR						
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya					100	%	1.853.966.000	25	%	260.510.000	50	%	643.007.080	0	%	0	0	%	0	50	%	643.007.080	50	34.68	
		X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10	Unit	220.744.000	0	Unit	29.525.000	4	Unit	91.321.760	0	Unit	0	0	Unit	0	4	Unit	91.321.760	40	41.37	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																												
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																												

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab						
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16							
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K (Ribu)									
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																														
		X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	1.145.448.000	0	Unit	160.125.000	0	Unit	367.377.560	0	Unit	0	0	Unit	367.377.560	0	32.07	0	Unit	367.377.560	0	32.07				
		X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					65	Unit	487.774.000	3	Unit	70.860.000	55	Unit	184.307.760	0	Unit	0	0	Unit	184.307.760	84.62	37.79	55	Unit	184.307.760	84.62	37.79				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					41.54	37.08											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR	SR											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					50	47.16											
Predikat Kinerja Kegiatan																					SR	SR											
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan					221000	Ton	488.902.200	53102	Ton	61.104.200	97500	Ton	151.238.800	0	Ton	0	0	Ton	0	97500	Ton	151.238.800	44.12	30.93	97500	Ton	151.238.800	44.12	30.93	
		3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya					100	%	488.902.200	25	%	61.104.200	50	%	151.238.800	0	%	0	0	%	0	50	%	151.238.800	50	30.93	50	%	151.238.800	50	30.93	
		3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Terseda					1	Unit	240.000.000	0	Unit	0	0	Unit	19.990.600	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	19.990.600	0	8.33	0	Unit	19.990.600	0	8.33	
		3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana					2	Layanan	248.902.200	0	Layanan	61.104.200	0	Layanan	131.248.200	0	Layanan	0	0	Layanan	0	0	Layanan	131.248.200	0	52.73	0	Layanan	131.248.200	0	52.73	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					0	30.53											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																						SR											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					50	30.93											
Predikat Kinerja Kegiatan																					SR	SR											
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program										5.453.145.000			895.863.848			2.152.886.686		0		0			2.152.886.686			2.152.886.686							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																					47.06	35.63											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																					SR	SR											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																																	



FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I
PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025				Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab			
							I				II				III				IV															
1	2	3	4	5	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Poin	Rp (Ribu)	K	Poin	Rp (Ribu)	K	Poin	Rp (Ribu)	K	Poin	Rp (Ribu)	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Poin	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	16					
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan						100	Poin	3.059.545.696	25	Poin	556.738.549	50	Poin	1.198.371.389	0	Poin	0	0	Poin	0	50	Poin	1.198.371.389	50	39.17	50	Poin	1.198.371.389	50	39.17	
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)						100	%	163.016.600	25	%	37.805.880	50	%	70.044.760	0	%	0	0	%	0	50	%	70.044.760	50	42.97	50	%	70.044.760	50	42.97	
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12	Laporan	163.016.600	3	Laporan	37.805.880	6	Laporan	70.044.760	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	70.044.760	50	42.97	6	Laporan	70.044.760	50	42.97	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						50	42.97											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																						SR	SR											
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan jasa administrasi yang terpenuhi						100	%	75.965.800	25	%	13.380.000	50	%	27.180.000	0	%	0	0	%	0	50	%	27.180.000	50	35.78	50	%	27.180.000	50	35.78	
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12	Laporan	75.965.800	3	Laporan	13.380.000	6	Laporan	27.180.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	27.180.000	50	35.78	6	Laporan	27.180.000	50	35.78	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																						50	35.78											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																						SR	SR											
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan						100	%	392.031.500	25	%	127.754.000	50	%	233.661.500	0	%	0	0	%	0	50	%	233.661.500	50	59.6	50	%	233.661.500	50	59.6	
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						12	Paket	17.177.500	3	Paket	240.000	6	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	240.000	50	1.4	6	Paket	240.000	50	1.4	
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12	Paket	57.096.000	3	Paket	1.050.000	6	Paket	14.186.300	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	14.186.300	50	24.85	6	Paket	14.186.300	50	24.85	
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						14	Paket	2.610.000	3	Paket	420.000	6	Paket	420.000	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	420.000	42.86	16.09	6	Paket	420.000	42.86	16.09	
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12	Paket	17.300.000	3	Paket	0	6	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	0	50	0	6	Paket	0	50	0	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi dan kerjasama yang baik antar intansi yang terkait.																																		
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Kesulitan mencari penyedia barang/jasa yang telah memiliki akun user Ekatalog Epurchasing V6 di area lingkungan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mencari penyedia barang/jasa yang telah memiliki akun user Ekatalog Epurchasing V6 baik didalam atau diluar area lingkungan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap																																		

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab						
					I				II				III				IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16								
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)									
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi					221000	Ton	1.068.688.360	53102	Ton	37.805.880	97500	Ton	84.995.010	0	Ton	0	0	Ton	0	97500	Ton	84.995.010	44.12	7.95							
		3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Peningkatan jumlah ikan yang didaratkan pada Pelabuhan Perikanan					100	%	1.068.688.360	25	%	37.805.880	50	%	84.995.010	0	%	0	0	%	0	50	%	84.995.010	50	7.95	50	%	84.995.010	50	7.95		
		3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia					95	Unit	806.199.160	0	Unit	0	49	Unit	9.518.250	0	Unit	0	0	Unit	0	49	Unit	9.518.250	51.58	1.18	49	Unit	9.518.250	51.58	1.18		
		3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana					4	Layanan	262.489.200	1	Layanan	37.805.880	2	Layanan	75.476.760	0	Layanan	0	0	Layanan	0	2	Layanan	75.476.760	50	28.75	2	Layanan	75.476.760	50	28.75		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				50.79	14.97													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					SR													
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				50	7.95													
Predikat Kinerja Kegiatan																					SR													
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program										4.128.234.056			594.544.429			1.283.366.399		0		0			1.283.366.399			1.283.366.399								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																				47.06	23.56													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																					SR													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi dan kerjasama yang baik antar intansi yang terkait.																																		
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Kesulitan mencari penyedia barang/jasa yang telah memiliki akun user Ekatalog Epurchasing V6 di area lingkungan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mencari penyedia barang/jasa yang telah memiliki akun user Ekatalog Epurchasing V6 baik didalam atau diluar area lingkungan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap																																		



FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 RENJA PERANGKAT DAERAH
 TRIWULAN I
 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU
 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025				Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab			
							I				II				III				IV						14						15		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16							
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)		K (%)	Rp (%)	K		Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)		
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan					100	Poin	1.244.356.000	25	Poin	214.622.993	50	Poin	462.976.738	0	Poin	0	50	Poin	462.976.738	50	37.21	50	Poin	462.976.738	50	37.21				
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals \$Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)					100	%	39.744.000	25	%	9.761.664	50	%	16.274.840	0	%	0	50	%	16.274.840	50	40.95	50	%	16.274.840	50	40.95				
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12	Dokumen	39.744.000	3	Dokumen	9.761.664	6	Dokumen	16.274.840	0	Dokumen	0	6	Dokumen	16.274.840	50	40.95	6	Dokumen	16.274.840	50	40.95				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																							50	40.95									
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait					100	%	69.600.000	25	%	17.400.000	50	%	34.800.000	0	%	0	50	%	34.800.000	50	50	50	%	34.800.000	50	50				
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	Dokumen	69.600.000	3	Dokumen	17.400.000	6	Dokumen	34.800.000	0	Dokumen	0	6	Dokumen	34.800.000	50	50	6	Dokumen	34.800.000	50	50				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																							50	50									
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan					100	%	242.787.000	25	%	60.158.040	50	%	107.928.040	0	%	0	50	%	107.928.040	50	44.45	50	%	107.928.040	50	44.45				
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	19.732.600	3	Paket	0	4	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	4	Paket	0	33.33	0	4	Paket	0	33.33	0		
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	20.852.400	3	Paket	4.553.600	6	Paket	11.863.600	0	Paket	0	6	Paket	11.863.600	50	56.89	6	Paket	11.863.600	50	56.89				
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	Paket	87.006.000	3	Paket	1.410.000	6	Paket	22.330.000	0	Paket	0	6	Paket	22.330.000	50	25.66	6	Paket	22.330.000	50	25.66				
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	7.350.000	2	Paket	0	4	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	4	Paket	0	33.33	0	4	Paket	0	33.33	0	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025				Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14				15		16
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota																										
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																					75	40.72						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																					S	SR						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																					50	43.85						
Predikat Kinerja Kegiatan																					SR	SR						
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program									2.971.155.000			508.063.679			1.220.140.032		0		0		1.220.140.032				1.220.140.032			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																					52.79	40.53						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																					R	SR						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																												
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																												



FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 RENJA PERANGKAT DAERAH
 TRIWULAN I
 PELABUHAN PERIKAMAN KOTABARU
 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025				Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab					
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)			I		II		III		IV																	
								K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16							
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan					100	Point	1.053.415.000	25	Point	149.994.278	50	Point	613.017.792	0	Point	0	0	Point	0	50	Point	613.017.792	50	58.19	50	Point	613.017.792	50	58.19	
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound).					100	%	46.224.000	25	%	9.755.220	50	%	19.510.440	0	%	0	0	%	0	50	%	19.510.440	50	42.21	50	%	19.510.440	50	42.21	
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12	Laporan	46.224.000	3	Laporan	9.755.220	6	Laporan	19.510.440	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	19.510.440	50	42.21	6	Laporan	19.510.440	50	42.21	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			50	42.21													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR													
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telahdiverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait					100	%	61.200.000	25	%	9.400.000	50	%	23.500.000	0	%	0	0	%	0	50	%	23.500.000	50	38.4	50	%	23.500.000	50	38.4	
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	Dokumen	61.200.000	3	Dokumen	9.400.000	6	Dokumen	23.500.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	Dokumen	23.500.000	50	38.4	6	Dokumen	23.500.000	50	38.4	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			50	38.4													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			SR	SR													
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemuhan layanan umum kantor yang telah diberikan.					100	%	106.758.500	25	%	29.668.900	50	%	45.212.860	0	%	0	0	%	0	50	%	45.212.860	50	42.35	50	%	45.212.860	50	42.35	
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	3.864.000	0	Paket	0	12	Paket	3.836.000	0	Paket	0	0	Paket	0	12	Paket	3.836.000	100	99.28	12	Paket	3.836.000	100	99.28	
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	33.925.100	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0	Paket	0	0	0	
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	Paket	2.030.600	3	Paket	328.900	6	Paket	986.700	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	986.700	50	48.59	6	Paket	986.700	50	48.59	
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	6.347.800	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0	Paket	0	0	0	
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	60.591.000	3	Laporan	29.340.000	6	Laporan	40.390.160	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	40.390.160	50	66.66	6	Laporan	40.390.160	50	66.66	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			40	42.91													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Faktor Penghambat pencapaian kinerja : - Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																																	

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 RENJA PERANGKAT DAERAH
 TRIWULAN I
 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN
 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025				Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)		K		Rp (Ribu)				K		Rp (Ribu)				K (%)	Rp (%)	K		Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	K	Rp (Ribu)	6	K	Rp (Ribu)	7	K	Poin	Rp (Ribu)	8	K	Poin	Rp (Ribu)	9	K	Poin	Rp (Ribu)	10	K	Poin	Rp (Ribu)	11	K	Poin	Rp (Ribu)	12	K	Poin	Rp (Ribu)	13	K (%)	Rp (%)	14	K	Poin	Rp (Ribu)	15	K	Poin	Rp (Ribu)	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Keseekretariatan							100	Poin	2.137.883.000	25	Poin	353.957.613	50	Poin	793.998.920	0	Poin	793.998.920	50	37.14	50	Poin	793.998.920	50	37.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Fasilitas/Alat Pendukung Kinerja

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab						
							I				II				III				IV														
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10			11			12			13		14			15		16
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)				
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	6.139.500	3	Paket	0	6	Paket	3.311.700	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	3.311.700	50	53.94	6	Paket	3.311.700	50	53.94	
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	Paket	29.671.400	3	Paket	0	6	Paket	12.350.000	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	12.350.000	50	41.62	6	Paket	12.350.000	50	41.62	
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	22.650.000	3	Paket	0	6	Paket	3.676.000	0	Paket	0	0	Paket	0	6	Paket	3.676.000	50	16.23	6	Paket	3.676.000	50	16.23	
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	108.788.000	3	Laporan	59.174.292	6	Laporan	87.289.292	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	87.289.292	50	80.24	6	Laporan	87.289.292	50	80.24	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								50	48.01								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR								
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor					100	%	60.000	25	%	0	50	%	60.000	0	%	0	0	%	0	50	%	60.000	50	100	50	%	60.000	50	100	
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1	Unit	60.000	0	Unit	0	0	Unit	60.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	60.000	0	100	0	Unit	60.000	0	100	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								0	100								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																									ST								
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan					100	%	743.775.400	25	%	147.001.813	50	%	307.752.853	0	%	0	0	%	0	50	%	307.752.853	50	41.38	50	%	307.752.853	50	41.38	
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Laporan	81.058.000	3	Laporan	19.956.960	6	Laporan	39.197.400	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	39.197.400	50	48.36	6	Laporan	39.197.400	50	48.36	
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	159.121.600	3	Laporan	29.013.973	6	Laporan	53.783.053	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	53.783.053	50	33.8	6	Laporan	53.783.053	50	33.8	
		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	503.595.800	3	Laporan	98.030.880	6	Laporan	214.772.400	0	Laporan	0	0	Laporan	0	6	Laporan	214.772.400	50	42.65	6	Laporan	214.772.400	50	42.65	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								50	41.6								
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR								
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya					100	%	435.275.700	25	%	40.953.138	50	%	128.000.796	0	%	0	0	%	0	50	%	128.000.796	50	29.41	50	%	128.000.796	50	29.41	
		X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8	Unit	98.699.700	1	Unit	1.999.218	5	Unit	50.565.996	0	Unit	0	0	Unit	0	5	Unit	50.565.996	62.5	51.23	5	Unit	50.565.996	62.5	51.23	
		X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	336.576.000	1	Unit	38.953.920	1	Unit	77.434.800	0	Unit	0	0	Unit	0	1	Unit	77.434.800	100	23.01	1	Unit	77.434.800	100	23.01	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Fasilitas/Alat Pendukung Kinerja																																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																																	

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2025 Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025	Unit Penanggung Jawab									
							I		II		III		IV																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																81.25	37.12															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																T	SR															
		X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tata Kelola pemerintahan yang baik					100	%	722.160.000	25	%	101.378.370	50	%	223.738.279	0	%	0	0	%	0	50	%	223.738.279	50	30.98	50	%	223.738.279	50	30.98
		X.XX.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	Unit Kerja	722.160.000	1	Unit Kerja	101.378.370	1	Unit Kerja	223.738.279	0	Unit Kerja	0	0	Unit Kerja	0	1	Unit Kerja	223.738.279	100	30.98	1	Unit Kerja	223.738.279	100	30.98
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																100	30.98															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																ST	SR															
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50	43.33															
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR															
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi					221000	Ton	472.824.000	53102	Ton	111.778.280	97500	Ton	231.821.360	0	Ton	0	0	Ton	0	97500	Ton	231.821.360	44.12	49.03	97500	Ton	231.821.360	44.12	49.03
		3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya					100	%	472.824.000	25	%	111.778.280	50	%	231.821.360	0	%	0	0	%	0	50	%	231.821.360	50	49.03	50	%	231.821.360	50	49.03
		3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia					1	Unit	240.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0
		3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan yang Terlaksana					2	Layanan	472.584.000	2	Layanan	111.778.280	2	Layanan	231.821.360	0	Layanan	0	0	Layanan	0	2	Layanan	231.821.360	100	49.05	2	Layanan	231.821.360	100	49.05
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50	24.53															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	SR															
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50	49.03															
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR															
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program										2.610.707.000			465.735.893			1.025.820.280		0		0		1.025.820.280			1.025.820.280							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																47.06	43.08															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																SR	SR															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Fasilitas/Alat Pendukung Kinerja																																
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -																																



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD disampaikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021–2026.

Visi pembangunan tahun 2021–2026 yang dilaksanakan yaitu “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mengemban amanah untuk menjalankan Misi ke-2, yaitu: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, dalam rangka Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi) dan Misi ke-5, yaitu: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana, dalam rangka Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, dan Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Teknologi.

Sementara itu, tujuan pembangunan yang diwujudkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1) Meningkatnya Perekonomian Daerah;
- 2) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan; dan
- 3) Memperkuat Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- 1) Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan;
- 3) Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing;



4) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 6 (enam) program pembangunan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel 2.2 disampaikan kajian terhadap Review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023-2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.



Tabel 2.2. Review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023-2024

No	Indikator	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	LPE Perikanan (%)	6,00	6,50	2,88	2,97	48,03	45,75
2.	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	211.000,00	212.500,00	210.097,47	218.022,00	99,57	102,60
3.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	167.419,00	177.272,00	157.116,78	151.438,00	93,85	85,43
4.	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan/NTNP (angka)	102,03	102,95	99,22	99,86	97,25	97,00
5.	Nilai ekspor hasil perikanan (milyar Rupiah)	170,00	171,00	152,00	231,04	89,41	135,11
6.	Angka konsumsi Ikan masyarakat	63,00	64,00	64,70	65,50	102,70	102,34
7.	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi dasar dalam penentuan sasaran strategis, yang dipandang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa mendatang, yaitu:

1. Pengembangan budidaya ikan gabus

Ikan gabus merupakan salah satu ikan yang menyumbang inflasi di Kalimantan Selatan terutama pada saat awal musim hujan dimana ketersediaan ikan gabus di alam terbatas. harga ikan gabus haruan bisa mencapai lebih Rp. 100.000/kg. Produksi ikan gabus haruan di Kalimantan Selatan tahun 2024 didominasi dari hasil penangkapan di alam (10.113,60 ton), yaitu sebesar 89,60%, sedangkan dari kegiatan budidaya baru memberikan kontribusi sebesar 862,465ton atau 10,40%. Mengingat hal tersebut salah satu alternatif peningkatan produksi ikan gabus haruan adalah melalui kegiatan budidaya. Kegiatan pengembangan budidaya ikan gabus dilaksanakan berbasis kawasan di Kab. HST, HSS, HSU, Tabalong dan Barito Kuala.

2. Pengembangan budidaya udang

Produksi perikanan budidaya dalam lima tahun terakhir tidak melampaui target produksi, sementara potensi perikanan budidaya masih banyak yang belum termanfaatkan. Potensi areal budidaya tambak seluas 53.282 Ha dengan luasan tambak yang termanfaatkan seluas 16.301,95 Ha. Produksi tambak di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih rendah, disebabkan sebagian besar menggunakan teknologi sederhana yang mengandalkan pakan alami sementara itu tidak ada pupuk bersubsidi untuk pembudidayaan perikanan.

Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mendapat pupuk non subsidi hanya 14 pokdakan air payau dari 614 pokdakan air payau yang ada dengan jumlah pupuknya 550 kg/pokdakan.

Produksi benih udang dan bandeng untuk perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan masih relatif terbatas, karena hanya 1 buah BBU yang menghasilkan benur/nener yaitu Balai Benih Udang di Kotabaru. Kekurangan benur dan nener didatangkan dari luar daerah yaitu dari Pulau Jawa



dan Bali. Untuk mengatasi hal tersebut perlu penumbuhan UPR/hatchery skala kecil dan mendorong kabupaten Tanah Bumbu untuk mengoptimalkan Balai Benih Ikan untuk produksi komoditas tersebut.

3. Pengendalian HPI ikan/udang dan rumput laut

Rendahnya pengetahuan pembudidaya dan petugas teknis/ lapangan tentang pengendalian kesehatan ikan/udang dan rumput laut di tambak adalah masalah yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti gagal panen, rendahnya kualitas hasil panen, dan peningkatan risiko penyakit pada budidaya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, penyuluhan, magang dan arus informasi yang mudah diakses serta pembentukan gugus tugas pengendalian HPI di Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

4. Penerapan CPIB dan CBIB belum sepenuhnya dilakukan oleh pembudidaya

Kesadaran untuk menerapkan cara budidaya ikan yang baik bagi pembudidaya dan Cara pembenihan Ikan yang baik masih rendah yaitu sebanyak 184 pembudidaya dari total 19.450 RTP, sehingga berdampak pada lemahnya kemampuan penerapan teknologi budidaya. Melalui pembinaan, bimbingan teknis yang lebih intensif diharapkan pembudidaya dan UPR dapat menerapkan dalam rangka peningkatan produksi ikan.

5. Peningkatan daya saing produk perikanan melalui penerapan standar mutu dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis Good Manufacturing Practice (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)

Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, peningkatan daya saing produk perikanan melalui penerapan standar mutu dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis Good Manufacturing Practice (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) di sentra Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari total UPI di Kalimantan Selatan sebanyak 9.985 unit, yang telah menerapkan GMP dan SSOP dan mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sampai dengan tahun 2024 sebanyak 24 Unit Pengolah Ikan (UPI) yang terdiri



dari 17 Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar dan 7 Unit Pengolah Ikan (UPI) Mikro Kecil dengan jumlah 30 Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Rendahnya unit pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi standar kelayakan dasar, mutu dan keamanan tersebut antara lain disebabkan sebagian besar termasuk katagore mikro yang permodalan usaha relative kecil sehingga sebagian UMKM produk olahan ikan tidak punya ruang produksi sendiri (tergabung dengan tempat tinggal) disamping belum mempunyai panduan mutu. Hal tersebut berdampak pada lemahnya daya saing produk di pasaran. Untuk hal tersebut kita Bersama Dinas Perikanan Kab/kota mendorong untuk secara berkelanjutan pembinaan penerapan GMP dan SSOP, serta optimalisasi pelayanan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi UPI/UKM di bidang perikanan.

6. Produk olahan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan standar dalam mendukung Hilirisasi industri hasil perikanan dan kelautan

Pembangunan hilirisasi usaha perikanan berbasis pengolahan komoditas perikanan non ekonomis (ikan rucah) atau komoditas perikanan budidaya (seperti ikan gabus dan patin) yang dapat dikonversi menjadi diversifikasi produk berupa albumin, tepung ikan berprotein tinggi dan frozen food serta produk olahan lainnya masih belum berkembang di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pada program pembangunan jangka menengah kedepan, hilirisasi usaha perikanan seperti pembinaan UPI untuk produksi albumin, Hidrolisat Protein Ikan (HPI), frozen food skala industri menjadi tantangan besar dan perlu mendapat perhatian serius dalam upaya peningkatan nilai tambah (added value) bagi masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kasus stunting.

7. Peningkatan Angka Konsumsi ikan Dalam Rumah Tangga untuk membentuk generasi sehat dan cerdas dan menurunkan angka stunting

Angka konsumsi ikan dalam rumah tangga (KIDRT) kita upayakan untuk terus ditingkatkan. Hal ini untuk memotivasi ibu ibu usia produktif untuk gemar memasak ikan yang selanjutnya akan mendorong minat anggota keluarga untuk menyukai ikan. Sehingga kita perlu mendorong upaya peningkatan KIDRT melalui Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan).



8. Produksi dan produktifitas hasil penangkapan ikan nelayan masih belum optimal

Produksi hasil penangkapan ikan menunjukkan total hasil tangkapan dalam periode tertentu, misalnya dalam satu tahun, sedangkan produktifitas menunjukkan efisiensi penangkapan ikan per unit usaha atau upaya penangkapan. Produktivitas biasanya diukur dengan membandingkan hasil tangkapan (output) dengan input seperti waktu, tenaga atau alat tangkap yang digunakan.

9. Ketersediaan sumber daya ikan lokal di kawasan reservaat dan perairan umum daratan yang terjaga cenderung mengalami penurunan

Ketersediaan sumber daya ikan lokal di kawasan reservaat dan perairan umum daratan sangat beragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kondisi ekosistem, jenis perairan, perairan umum daratan seperti sungai, rawa dan embung memiliki potensi perikanan tangkap yang besar sedangkan kawasan reservaat seperti wilayah pengelolaan perikanan di perairan darat (WPPNRI PD) juga memiliki potensi sumber daya ikan yang beragam.

10. Ketersediaan data dan informasi tentang Produksi Perikanan Tangkap masih belum optimal

Ketersediaan data dan informasi tentang produksi perikanan tangkap cukup banyak salah satunya adalah dari data statistik perikanan tangkap, data ini digunakan untuk pengelolaan perikanan tangkap. Jenis data yang harus tersedia adalah

- Volume produksi perikanan tangkap
- Jenis ikan yang ditangkap
- Jumlah Nelayan
- Jenis alat tangkap (Alat Penangkap Ikan/API)
- Jumlah RTP
- Jumlah Kapal

11. IUU Fishing dan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan

Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang terjadi di dalam kawasan konservasi perairan (KKP) berpotensi menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut yang dilindungi, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun—yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut dan penyangga keseimbangan ekosistem. Dampak dari kegiatan ini bukan hanya menurunkan kualitas dan fungsi ekologis kawasan, tetapi juga menyebabkan rendahnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Meskipun secara administratif luas KKP mengalami peningkatan, namun indikator keberhasilan berupa kawasan yang benar-benar terlindungi dan berfungsi optimal tidak tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih intensif serta penegakan hukum yang tegas di dalam wilayah konservasi untuk memastikan perlindungan kawasan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

12. Keterbatasan Sarpras dan SDM Pengawasan

Keterbatasan sarana prasarana serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan menjadi kendala utama dalam menjaga kawasan konservasi perairan secara efektif. Minimnya kapal patroli, peralatan teknologi pemantauan seperti VMS dan drone laut, serta jumlah dan kompetensi petugas pengawasan yang terbatas menyebabkan kawasan konservasi tidak dapat dipantau secara rutin dan menyeluruh. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari aktivitas penangkapan ilegal hingga perusakan habitat. Akibatnya, indikator luas kawasan konservasi yang dikelola secara efektif tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan karena fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan modernisasi sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, sinergi dengan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta peningkatan kapasitas dan jumlah personel pengawasan di lapangan.

13. Rendahnya Kepatuhan terhadap Zonasi Konservasi

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan zonasi dalam kawasan konservasi mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran, seperti masuknya aktivitas penangkapan ke dalam zona inti atau zona larang tangkap yang seharusnya dilindungi penuh. Hal ini berdampak



langsung pada terganggunya fungsi ekologis kawasan konservasi, karena zona-zona tersebut merupakan area vital bagi perlindungan dan regenerasi sumber daya hayati laut. Akibatnya, meskipun secara administratif luas kawasan konservasi terus bertambah, indikator efektivitas pengelolaan tidak tercapai karena fungsi zonasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan upaya sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha, penguatan aspek hukum dalam penegakan zonasi, serta pemantauan zonasi berbasis teknologi GIS guna memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peruntukannya.

14. Pencemaran Laut

Pencemaran laut yang berasal dari aktivitas darat maupun laut, seperti limbah industri, pertambangan, dan domestik, telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan di dalam kawasan konservasi perairan. Akumulasi limbah dan sedimentasi menyebabkan kerusakan pada ekosistem penting seperti terumbu karang, yang berujung pada hilangnya habitat dan terganggunya fungsi ekologis kawasan tersebut. Kondisi ini menjadikan kawasan konservasi tidak mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai zona perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, meskipun luas kawasan konservasi meningkat, efektivitas pengelolaannya tidak bisa diklaim turut meningkat jika pencemaran masih terus terjadi. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran, serta pemantauan kualitas air laut secara berkala untuk memastikan kondisi lingkungan kawasan konservasi tetap terjaga.

15. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya dalam bentuk pengawasan berbasis komunitas seperti kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), menyebabkan kawasan konservasi perairan (KKP) menjadi lebih rentan terhadap berbagai pelanggaran. Ketidakhadiran pengawasan langsung dari masyarakat lokal yang sehari-hari berinteraksi dengan wilayah pesisir dan laut berdampak pada lemahnya deteksi dini terhadap aktivitas ilegal maupun kerusakan lingkungan. Akibatnya, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi rendah karena tidak didukung oleh keterlibatan masyarakat secara



berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan langkah nyata berupa pemberdayaan masyarakat, pelatihan kapasitas pengawasan, serta pemberian insentif sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi.

16. Kurangnya Integrasi Data dan Koordinasi

Kurangnya integrasi data dan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan menyebabkan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, overlap penetapan kawasan konservasi, serta lemahnya penegakan hukum akibat ketidaksinkronan informasi antar instansi. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas perlindungan kawasan, tetapi juga menyebabkan data terkait luas kawasan konservasi yang dikelola secara efektif menjadi tidak valid atau tidak dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Akibatnya, indikator keberhasilan pengelolaan konservasi menjadi tidak akurat dan sulit dicapai secara nyata. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi konservasi yang terintegrasi (SIM-KKP), serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kawasan konservasi secara terpadu. Informasi sumber daya ikan cenderung terpusat di instansi tertentu, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, namun tidak terintegrasi dengan baik dengan pihak lain (universitas, nelayan lokal dan pemangku kepentingan lainnya). Selanjutnya, akses terhadap data oleh masyarakat nelayan dan pelaku usaha masih terbatas. Dalam pelaksanaannya sistem pendataan masih banyak yang bersifat konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital atau sistem informasi geografis (GIS) sertaminimnya penggunaan alat pemantauan seperti e-logbook, vessel monitoring system (VMS), dan sensor otomatis dalam pemanfaatan teknologi di lapangan.

17. Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang diarahkan untuk pengembangan kompetensi teknis bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.



18. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik

Merupakan proses yang berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Evaluasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yang diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, serta kinerja anggaran.



BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2045, KKP terutama melaksanakan tiga dari delapan misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 2) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan
- 3) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun *transformasi* pembangunan sektor kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan mindset pembangunan sektor kelautan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang mempertimbangkan daya dukung dan berorientasi pasar dengan menempatkan ekologi sebagai panglima untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas yang bertujuan memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/dampak negatif



kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya, dan serapan karbon dapat dijabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan meliputi:

1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Perluasan kawasan konservasi laut bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir dan laut, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir dengan target Luas Kawasan Konservasi 29,9 Juta Ha pada 2024 menjadi 32,5 Juta Ha pada 2029, dengan dampak:

- (1) Meningkatkan indeks Kesehatan laut;
- (2) Meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon (CCuS);
- (3) Meningkatkan nilai ekonomi karbon melalui carbon trading; dan
- (4) Menjaga kelestarian ikan.

2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona

Pengelolaan penangkapan ikan berbasis zona dan kuota untuk menjaga sumber daya ikan lestari, mencegah overfishing, meningkatkan manfaat ekonomi dan social untuk nelayan/pelaku usaha, mendorong pemerataan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan target Produksi perikanan tangkap 7,39 Juta Ton pada 2024 menjadi 7,5 Juta Ton pada 2029, dengan dampak:

- (1) Mewujudkan *legal, regulated, and reported fishing*;
- (2) Meningkatkan kontribusi sektor KP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
- (3) Menjaga stok ikan; dan
- (4) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat nelayan.

3) Peningkatan Produksi Budi Daya Berkelanjutan

Meningkatkan produksi perikanan melalui budi daya ikan di laut, pesisir, dan darat—dengan memperhatikan lingkungan, dan memastikan keseimbangan ekosistem, serta mempertahankan keanekaragaman hayati. dengan target Produksi perikanan budi daya 17,18 Juta Ton pada 2024 menjadi 22,7 Juta Ton pada 2029, dengan dampak:

- (1) Meningkatkan efektivitas dan produktivitas;



- (2) Meningkatkan ekspor produk perikanan budi daya di pasar global; dan
 - (3) Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir, mencegah aktivitas ilegal dan kerusakan lingkungan, serta mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan target Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan dengan indeks 82 pada 2029, Indeks Pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indeks 0,61 pada 2029 serta Produksi garam 2,04 Juta Ton pada 2024 menjadi 3 Juta Ton pada 2029 dengan dampak:
- (1) Terlindunginya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (111 pulau terluar, 455 pulau kecil kritis, 1215 pulau kecil berpenduduk);
 - (2) Meningkatkan kontribusi sektor KP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara; dan
 - (3) Menyediakan system pengawasan yang *automatic* dan *real-time* untuk meminimalisasi eksploitasi ilegal.
- 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut
- Kebijakan pembersihan sampah plastic di laut melalui partisipasi nelayan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat pesisir dalam menjaga Kesehatan laut dan hidup di lingkungan yang bersih dan sehat dengan target kumulatif Volume Pengelolaan Sampah dari Kegiatan Masyarakat di Pesisir dan Laut 744,6 Ton pada 2024 menjadi 1.244 Ton pada 2029, dengan dampak:
- (1) Laut Indonesia bebas sampah plastik;
 - (2) Terbentuk ekonomi sirkuler dalam penanganan sampah plastik; dan
 - (3) Terbentuknya sinergi *pentahelix* untuk penanganan sampah plastic laut (pemerintah, masyarakat, akademisi, pelakuusaha, dan media).

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) beserta indikator kinerja KKP tahun 2025-2029, terdiri dari:



- 1) SS-1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja Tingkat pengelolaan konservasi dari nilai 63,7 pada tahun 2025 menjadi nilai 68,7 pada tahun 2029.
- 2) SS-2 Meningkatnya Produksi Kelautan Perikanan, dengan Indikator Kinerja, yaitu:
 - (1) PDB Perikanan dari 595,05 triliun rupiah pada tahun 2025 menjadi 718,98 triliun rupiah pada tahun 2029;
 - (2) Volume Produksi Perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029.
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja, yaitu:
 - (1) Nilai Ekspor Hasil Perikanan dari 6,25 USD Miliar pada tahun 2025 menjadi 8,5 USD Miliar pada tahun 2029;
 - (2) Konsumsi Ikan Masyarakat, dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2029 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
 - (3) Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, dari 70% pada tahun 2029 menjadi 80% pada tahun 2029.
- 4) SS-4 Meningkatnya Nilai Tukar Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja, yaitu:
 - (1) Nilai Tukar Nelayan, dari 105-108 pada tahun 2025 menjadi 109-110 pada tahun 2029;
 - (2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, dari 103,25 pada tahun 2025 menjadi 104,25 pada tahun 2029; dan
 - (3) Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102 pada tahun 2025 menjadi 103 pada tahun 2029.
- 5) SS-5 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP Kompeten yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja dari 75% pada tahun 2025 menjadi 79% pada tahun 2029.



- 6) SS-6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi KKP dari indeks 90,05 tahun 2025 menjadi indeks 90,25 pada tahun 2029.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka menyukseskan Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu dalam rangka pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu untuk Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pemulihan, Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan.

Sementara itu sasaran penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan
2. Menurunnya Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Untuk mendukung capaian indikator kinerja utama pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pelaksanaan misi tersebut, sub prioritas pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan antara lain, yaitu:

1. Meningkatnya Produktivitas Ikan Tangkap;
2. Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Hasil Kelautan;
3. Meningkatnya Produktivitas Budidaya Ikan Air Tawar Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya Penjualan Karbon di Kawasan Pesisir;
5. Meningkatnya Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
			Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Poin	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.02	100.00	100.00	Target tercapai sesuai dengan target yang telah diberikan oleh biro organisasi yaitu dengan target 90,00 poin
2.	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	Ton	211.000,00	212.500,00	214.000,00	221.500,00	210,097.47	219.734,00	214,000.00	221.500,00	Target tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
3.	Jumlah Total Produksi Perikanan (budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	Ton	167.419,00	177,272.00	156.627,93	162.337,59	157,116.78	151.434,32	156.627,93	162.337,59	Tidak tercapainya target disebabkan oleh : - Cenderung naiknya harga pakan, harga jual ikan di petani ikan yang cenderung turun yang menyebabkan para pembudidaya menahan siklus produksi budidaya ikan - adanya kematian ikan yang disebabkan oleh faktor alam, terbatasnya permodalan usaha yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh pembudidaya ikan. Target indikator disesuaikan dengan target indikator di dalam Renstra 2025-2029 Dinas Kelautan dan perikanan



No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
			Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
4.	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/ Kapita/ Tahun	63,00	64.00	36,00	36,10	64.64	65.5	36,00	36,10	- Target tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Target indikator disesuaikan dengan target indikator di dalam Renstra 2025-2029 Dinas Kelautan dan perikanan
5.	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Target tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
6.	Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi	Ha	135.8	155.80	230	-	174.25	218.55	230	-	Target tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
7.	Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ha)	Ha	-	-	-	12.098,85	-	-	-	12.098,85	Merupakan indikator baru berdasarkan Renstra 2025-2029 Dinas Kelautan dan perikanan
8.	Persentase pemenuhan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi (%)	Ha	-	-	-	100	-	-	-	100	Merupakan indikator baru berdasarkan Renstra 2025-2029 Dinas Kelautan dan perikanan

Banjarbaru, Mei 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan

RUSDI HARTONO, S.Pi, MP
NIP. 19720426 199703 1 005



3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada Tabel 3.2 disampaikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, yang didalamnya memuat kajian (review) terhadap hasil Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- **Kegiatan** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - **Sub Kegiatan** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD



- **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- **Kegiatan** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - **Sub Kegiatan** Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Kegiatan** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - **Sub Kegiatan** Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - **Sub Kegiatan** Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - **Sub Kegiatan** Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - **Sub Kegiatan** Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - **Sub Kegiatan** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - **Sub Kegiatan** Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - **Sub Kegiatan** Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - **Sub Kegiatan** Pengadaan Mebel
 - **Sub Kegiatan** Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - **Sub Kegiatan** Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - **Sub Kegiatan** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - **Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - **Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - **Kegiatan** Peningkatan Pelayanan BLUD
 - **Sub Kegiatan** Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**
- **Kegiatan** Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - **Sub Kegiatan** Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat



- **Sub Kegiatan** Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- **Sub Kegiatan** Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- **Sub Kegiatan** Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan
- **Kegiatan** Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - **Sub Kegiatan** Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
 - **Sub Kegiatan** Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
 - **Sub Kegiatan** Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
- **Kegiatan** Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - **Sub Kegiatan** Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - **Sub Kegiatan** Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - **Sub Kegiatan** Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- **Kegiatan** Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- **Kegiatan** Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi



- **Sub Kegiatan** Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - **Kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
 - **Sub Kegiatan** Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
 - **Kegiatan** Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - **Sub Kegiatan** Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
 - **Kegiatan** Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
- **Kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - **Sub Kegiatan** Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
 - **Kegiatan** Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota



- **Sub Kegiatan** Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- **Sub Kegiatan** Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan** Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- **Sub Kegiatan** Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- **Kegiatan** Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

- **Kegiatan** Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
 - **Sub Kegiatan** Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi
 - **Sub Kegiatan** Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
 - **Sub Kegiatan** Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
 - **Sub Kegiatan** Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- **Kegiatan** Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - **Sub Kegiatan** Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi



- **Sub Kegiatan** Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
- **Sub Kegiatan** Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- **Kegiatan** Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - **Sub Kegiatan** Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- **Kegiatan** Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
 - **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								67.214.355.881,63	58.708.704.719,00	60.715.628.244,00	-6.498.727.637,63						77.571.017.972,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							67.214.355.881,63	58.708.704.719,00	60.715.628.244,00	-6.498.727.637,63							77.571.017.972,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							67.214.355.881,63	58.708.704.719,00	60.715.628.244,00	-6.498.727.637,63							77.571.017.972,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Poin	100 Poin	43.422.301.381,63	40.223.227.719,00	40.210.124.119,00	1.562.074.040,37							44.984.375.422,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)				100 %	100 %	3.570.000.000,00	2.321.342.800,00	2.148.130.200,00	-1.421.869.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		4.327.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	10 Dokumen	3.170.000.000,00	792.602.300,00	763.331.200,00	-2.406.668.800,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			3.807.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	250.000.000,00	771.481.900,00	639.166.900,00	389.166.900,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	757.258.600,00	745.632.100,00	595.632.100,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait				100 %	100 %	29.209.688.972,00	29.710.438.789,00	29.751.737.589,00	542.048.617,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		30.643.845.192,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/ Bulan	160 Orang/ Bulan	28.674.418.772,00	29.082.893.589,00	29.082.893.589,00	408.474.817,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			30.108.139.692,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	531.670.200,00	623.545.200,00	664.844.000,00	133.173.800,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			531.705.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas dan UPTD yang dapat dimanfaatkan/diooperasi onalkan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukkan/ masterplan yang telah ditetapkan				100 %	100 %	185.699.000,00	171.271.400,00	184.985.400,00	-713.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		188.732.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	185.699.000,00	171.271.400,00	184.985.400,00	-713.600,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			188.732.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku				100 %	100 %	913.830.100,00	1.527.489.700,00	1.436.271.700,00	522.441.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		1.429.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	235.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	-31.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			499.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	261.380.000,00	180.500.000,00	199.555.000,00	-61.825.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	0 Orang	132.448.000,00	86.167.000,00	0,00	-132.448.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				520 Orang	520 Orang	172.748.100,00	168.752.700,00	168.752.700,00	-3.995.400,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	453 Orang	112.254.000,00	888.070.000,00	863.964.000,00	751.710.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan				-	100 %	2.034.819.000,00	1.642.487.300,00	1.755.033.300,00	-279.785.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		2.200.149.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	126.100.700,00	110.437.700,00	121.399.700,00	-4.701.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	132.722.300,00	194.677.600,00	199.087.600,00	66.365.300,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	447.855.000,00	5.845.000,00	5.845.000,00	-442.010.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	78.912.000,00	78.560.000,00	89.700.000,00	10.788.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			82.680.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	82.008.000,00	85.588.000,00	85.588.000,00	3.580.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			82.008.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.167.221.000,00	1.167.379.000,00	1.253.413.000,00	86.192.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			1.315.461.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah memanfaatkan untuk menunjang layanan kantor				100 %	100 %	4.381.167.800,00	952.210.000,00	952.210.000,00	-3.428.957.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		2.469.240.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	2.320.309.000,00	0,00	0,00	-2.320.309.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			1.119.240.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.128.800.000,00	522.860.000,00	522.860.000,00	-605.940.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				92 Unit	42 Unit	932.058.800,00	429.350.000,00	429.350.000,00	-502.708.800,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan				-	100 %	1.296.231.530,00	1.621.430.730,00	1.639.899.730,00	343.668.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		1.305.009.230,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	111.212.000,00	124.622.000,00	129.152.000,00	17.940.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	209.609.230,00	272.009.230,00	272.009.230,00	62.400.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			200.009.230,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	975.410.300,00	1.224.799.500,00	1.238.738.500,00	263.328.200,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			985.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya				100 %	100 %	1.830.864.979,63	2.276.557.000,00	2.341.856.200,00	510.991.220,37			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		2.420.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	36 Unit	1.110.490.000,00	1.251.197.000,00	1.066.496.200,00	-43.993.800,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			1.250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	571.464.979,63	876.350.000,00	1.126.350.000,00	554.885.020,37	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				222 Unit	165 Unit	148.910.000,00	149.010.000,00	149.010.000,00	100.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			170.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)				230 ha	230 ha	7.551.967.000,00	6.327.313.300,00	6.487.274.300,00	3.612.283.000,00							11.164.250.000,00		
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas akumulasi kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir				1,90 % 230 Ha	1,86 % 230 Ha	5.543.000.000,00	4.902.298.900,00	4.978.194.900,00	-564.805.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Masyarakat Pesisir dan Kelompok Penggiat Konservasi Provinsi Kalimantan Selatan		6.784.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																			
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				179.659,89 Ha	179.659,89 Ha	1.179.320.000,00	1.198.975.200,00	901.055.200,00	-278.264.800,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			1.338.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				23,6 Ha	27,8 Ha	3.744.340.000,00	3.015.057.100,00	3.294.577.100,00	-449.762.900,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			4.655.343.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				105 Orang	90 Orang	343.000.000,00	288.266.600,00	369.333.600,00	26.333.600,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan																			
			Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	276.340.000,00	400.000.000,00	413.229.000,00	136.889.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			290.157.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan Rekomendasi Perizinannya Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir				100 % 1,90 %	100 % 1,86 %	1.276.967.000,00	1.082.967.000,00	1.159.962.000,00	-117.005.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Masyarakat Pesisir dan Kelompok Penggiat Konservasi		3.150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	450.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	756.000.000,00	756.000.000,00	256.000.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				3 Dokumen	3 Dokumen	326.967.000,00	226.967.000,00	303.962.000,00	-23.005.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir				100 % 1,90 %	100 % 1,86 %	732.000.000,00	342.047.400,00	349.117.400,00	-382.882.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Masyarakat Pesisir dan Kelompok Penggiat Konservasi		1.230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				5 Kelompok	2 Kelompok	321.000.000,00	232.884.000,00	280.741.200,00	-40.258.800,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			480.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				50 Orang	10 Orang	160.000.000,00	45.569.000,00	36.941.000,00	-123.059.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																			
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	5 Kelompok	251.000.000,00	63.594.400,00	31.435.200,00	-219.564.800,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi				221000 ton	221000 ton	5.791.089.600,00	4.309.249.600,00	5.830.157.850,00	977.907.650,00							6.768.997.250,00		
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) di laut dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi				163000 Ton	163000 Ton	2.280.873.350,00	2.526.786.600,00	3.710.477.100,00	1.429.603.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		2.498.781.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	512.092.350,00	512.092.000,00	422.071.000,00	-90.021.350,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			530.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				10 Unit	15 Unit	1.768.781.000,00	2.014.694.600,00	3.288.406.100,00	1.519.625.100,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			1.968.781.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) di PUD dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi</i>				63889 Ton	64000 Ton	2.250.216.250,00	1.110.737.000,00	1.707.805.250,00	-542.411.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2.955.216.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	383.000.000,00	266.427.000,00	-533.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			1.305.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat</i>				7 Unit	4 Unit	1.450.216.250,00	727.737.000,00	1.441.378.250,00	-8.838.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			1.650.216.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang memiliki dokumen perizinan sesuai ketentuan</i>				220 Unit	220 Unit	1.060.000.000,00	539.226.000,00	326.166.500,00	-733.833.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		1.090.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																			
			<i>Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>				100 Persentase	100 Persentase	550.000.000,00	337.090.000,00	220.091.000,00	-329.909.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			575.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	510.000.000,00	202.136.000,00	106.075.500,00	-403.924.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan		515.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT				100 %	100 %	200.000.000,00	132.500.000,00	85.709.000,00	-114.291.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				200 Dokumen	250 Dokumen	200.000.000,00	132.500.000,00	85.709.000,00	-114.291.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan		225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi				187465 ton	156627,93 ton	3.377.534.000,00	2.878.960.200,00	4.024.749.450,00	349.830.150,00							3.727.364.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibina perizinan usahanya				100 %	100 %	168.823.200,00	12.124.800,00	6.804.800,00	-162.018.400,00			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		219.470.160,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	2 Rekomendasi	168.823.200,00	12.124.800,00	6.804.800,00	-162.018.400,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			219.470.160,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina				100 %	100 %	1.367.190.800,00	1.051.129.700,00	1.061.261.825,00	-305.928.975,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pembidayaan Ikan di Laut		1.657.893.990,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	158.907.000,00	78.416.500,00	176.171.500,00	17.264.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			206.579.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				3 Unit	2 Unit	341.296.500,00	272.215.500,00	177.175.500,00	-164.121.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			345.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pembudidaya				350 Orang	163 Orang	650.278.000,00	596.551.400,00	515.133.525,00	-135.144.475,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			824.592.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	216.709.300,00	103.946.300,00	192.781.300,00	-23.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			281.722.090,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Persentase cakupan wilayah yang terkelola usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				100 %	100 %	1.841.520.000,00	1.815.705.700,00	2.956.682.825,00	1.115.162.825,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		1.850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				14 Unit	16 Unit	1.841.520.000,00	1.815.705.700,00	2.956.682.825,00	1.115.162.825,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			1.850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)				100 %	100 %	4.512.978.400,00	2.831.469.400,00	2.552.637.400,00	3.087.021.600,00							7.600.000.000,00		
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil				100 %	100 %	3.512.978.400,00	2.246.500.400,00	2.108.173.400,00	-1.404.805.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		5.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani				6 Perkara	6 Perkara	1.500.000.000,00	662.478.000,00	562.520.000,00	-937.480.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	466.300.000,00	343.809.000,00	343.809.000,00	-122.491.000,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			932.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	33.700.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			67.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				8 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	1.512.978.400,00	1.206.513.400,00	1.168.144.400,00	-344.834.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			2.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di lintas kabupaten/kota				100 %	100 %	1.000.000.000,00	584.969.000,00	444.464.000,00	-555.536.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	700.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-675.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	150.000.000,00	534.969.000,00	394.464.000,00	244.464.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			1.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	150.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi Ikan masyarakat				65 Kg/Kap/thn	38,31 Kg/Kap/thn	2.558.485.500,00	2.138.484.500,00	1.610.685.125,00	767.545.650,00							3.326.031.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15 %	15 %	151.237.000,00	164.651.000,00	84.369.000,00	-66.868.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha Perikanan		213.625.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	2 Dokumen	151.237.000,00	164.651.000,00	84.369.000,00	-66.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			213.625.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan				100 %	100 %	2.407.248.500,00	1.973.833.500,00	1.526.316.125,00	-880.932.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing; Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		3.112.406.050,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				10 Kegiatan	6 Kegiatan	2.032.554.000,00	1.599.139.000,00	1.292.850.500,00	-739.703.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			2.717.918.450,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				4 Kegiatan	2 Kegiatan	374.694.500,00	374.694.500,00	233.465.625,00	-141.228.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			394.487.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			J U M L A H						67.214.355.881,63	58.708.704.719,00	60.715.628.244,00	-6.498.727.637,63							77.571.017.972,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN								3.323.739.800,00	3.071.553.250,00	2.944.424.250,00	-379.315.550,00						3.108.638.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.323.739.800,00	3.071.553.250,00	2.944.424.250,00	-379.315.550,00							3.108.638.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.323.739.800,00	3.071.553.250,00	2.944.424.250,00	-379.315.550,00							3.108.638.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Poin	100 Poin	2.064.586.300,00	1.741.015.300,00	1.809.850.300,00	-240.948.300,00							1.823.638.000,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)				100 %	100 %	52.982.000,00	55.582.000,00	45.356.000,00	-7.626.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	52.982.000,00	55.582.000,00	45.356.000,00	-7.626.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait				-	100 %	131.008.000,00	143.248.000,00	143.248.000,00	12.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		133.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	131.008.000,00	143.248.000,00	143.248.000,00	12.240.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			133.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku				100 %	100 %	244.843.000,00	238.086.000,00	120.836.000,00	-124.007.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		257.283.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	2 Paket	15.400.000,00	15.500.000,00	24.800.000,00	9.400.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	3 Orang	50.783.000,00	50.783.000,00	20.911.000,00	-29.872.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			50.783.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	16 Orang	178.660.000,00	171.803.000,00	75.125.000,00	-103.535.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			190.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemuenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	273.592.000,00	239.593.000,00	180.869.000,00	-92.723.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		245.355.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.053.000,00	-4.947.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			41.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.555.000,00	26.536.000,00	26.536.000,00	-19.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			27.355.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	174.037.000,00	146.057.000,00	92.280.000,00	-81.757.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			143.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor				100 %	100 %	456.095.000,00	258.500.000,00	510.000.000,00	53.905.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	22 Unit	456.095.000,00	258.500.000,00	240.500.000,00	-215.595.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				-	1 Unit	0,00	0,00	269.500.000,00	269.500.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan</i>				100 %	100 %	461.146.300,00	491.066.300,00	445.021.300,00	-16.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		471.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	4.955.000,00	-1.045.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	155.000.000,00	155.000.000,00	111.000.000,00	-44.000.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			155.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	300.146.300,00	330.066.300,00	329.066.300,00	28.920.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya</i>				-	100 %	444.920.000,00	314.940.000,00	364.520.000,00	-80.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		387.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	5 Unit	145.120.000,00	123.400.000,00	123.400.000,00	-21.720.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	118.400.000,00	50.320.000,00	99.900.000,00	-18.500.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				113 Unit	60 Unit	181.400.000,00	141.220.000,00	141.220.000,00	-40.180.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			185.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi Ikan masyarakat				65 Kg/Kap/thn	38,31 Kg/Kap/thn	1.259.153.500,00	1.330.537.950,00	1.134.573.950,00	25.846.500,00							1.285.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan				100 %	100 %	1.259.153.500,00	1.330.537.950,00	1.134.573.950,00	-124.579.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		1.285.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	3 Kegiatan	903.377.700,00	928.497.700,00	838.621.700,00	-64.756.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			910.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				4 Kegiatan	4 Kegiatan	355.775.800,00	402.040.250,00	295.952.250,00	-59.823.550,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			375.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		J U M L A H							3.323.739.800,00	3.071.553.250,00	2.944.424.250,00	-379.315.550,00						3.108.638.000,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN								3.657.289.900,00	4.196.353.740,00	3.907.541.740,00	250.251.840,00						4.012.767.490,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.657.289.900,00	4.196.353.740,00	3.907.541.740,00	250.251.840,00							4.012.767.490,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.657.289.900,00	4.196.353.740,00	3.907.541.740,00	250.251.840,00							4.012.767.490,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				-	100 Poin	1.652.848.400,00	1.442.749.100,00	1.395.300.100,00	155.033.440,00							1.807.881.840,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait				100 %	100 %	102.504.000,00	108.744.000,00	108.744.000,00	6.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		102.504.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	102.504.000,00	108.744.000,00	108.744.000,00	6.240.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			102.504.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	778.217.800,00	207.393.500,00	159.944.500,00	-618.273.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		856.039.580,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.464.300,00	13.946.500,00	13.946.500,00	-1.517.800,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			17.010.730,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.206.100,00	21.223.600,00	21.223.600,00	6.017.500,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			16.726.710,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			26.180.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.999.400,00	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			5.499.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	718.748.000,00	143.424.000,00	95.975.000,00	-622.773.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			790.622.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor				100 %	100 %	65.000.000,00	294.780.000,00	294.780.000,00	229.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		71.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5 Unit	65.000.000,00	294.780.000,00	294.780.000,00	229.780.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			71.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	342.532.600,00	429.385.600,00	429.385.600,00	86.853.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		376.784.860,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			59.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	288.532.600,00	375.385.600,00	375.385.600,00	86.853.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			317.384.860,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya				100 %	100 %	364.594.000,00	402.446.000,00	402.446.000,00	37.852.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		401.053.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	191.748.000,00	219.048.000,00	219.048.000,00	27.300.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			210.922.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	3 Unit	81.548.000,00	81.320.000,00	81.320.000,00	-228.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			89.702.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				38 Unit	35 Unit	91.298.000,00	102.078.000,00	102.078.000,00	10.780.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			100.427.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi				187465 ton	156627,93 ton	2.004.441.500,00	2.753.604.640,00	2.512.241.640,00	200.444.150,00							2.204.885.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina				0 % 100 %	100 %	558.988.500,00	993.051.640,00	838.844.640,00	279.856.140,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		614.887.350,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	558.988.500,00	993.051.640,00	838.844.640,00	279.856.140,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			614.887.350,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Persentase cakupan wilayah yang terkelola usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				100 %	100 %	1.445.453.000,00	1.760.553.000,00	1.673.397.000,00	227.944.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		1.589.998.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9 Unit	9 Unit	1.445.453.000,00	1.760.553.000,00	1.673.397.000,00	227.944.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			1.589.998.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		J U M L A H							3.657.289.900,00	4.196.353.740,00	3.907.541.740,00	250.251.840,00						4.012.767.490,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN							5.314.000.000,00	5.818.000.000,00	5.953.145.000,00	639.145.000,00						5.925.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.314.000.000,00	5.818.000.000,00	5.953.145.000,00	639.145.000,00							5.925.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.314.000.000,00	5.818.000.000,00	5.953.145.000,00	639.145.000,00							5.925.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Poin	100 Poin	4.598.535.800,00	5.282.175.800,00	5.217.143.800,00	336.464.200,00							4.935.000.000,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)				100 %	100 %	142.059.400,00	166.719.400,00	166.719.400,00	24.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		155.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.506.400,00	45.746.400,00	45.746.400,00	6.240.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	102.553.000,00	120.973.000,00	120.973.000,00	18.420.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait				100 %	100 %	303.083.100,00	342.563.100,00	342.563.100,00	39.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		315.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	201.555.600,00	222.315.600,00	222.315.600,00	20.760.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101.527.500,00	120.247.500,00	120.247.500,00	18.720.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku				100 %	100 %	376.799.000,00	394.206.000,00	188.211.000,00	-188.588.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		395.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	32.523.000,00	31.635.000,00	31.635.000,00	-888.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	0 Orang	344.276.000,00	362.571.000,00	156.576.000,00	-187.700.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	712.535.700,00	698.151.700,00	794.824.700,00	82.289.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		735.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.837.200,00	88.461.500,00	88.461.500,00	2.624.300,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.218.800,00	53.527.800,00	53.527.800,00	4.309.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	141.278.900,00	123.318.600,00	123.318.600,00	-17.960.300,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.404.800,00	36.704.800,00	36.704.800,00	300.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	390.196.000,00	386.539.000,00	483.212.000,00	93.016.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor				100 %	100 %	298.101.600,00	233.166.600,00	233.166.600,00	-64.935.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		240.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	68.997.600,00	68.997.600,00	68.997.600,00	0,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				41 Unit	12 Unit	229.104.000,00	164.169.000,00	164.169.000,00	-64.935.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			240.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	1.567.503.000,00	1.593.403.000,00	1.493.883.000,00	-73.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		1.595.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	72.708.000,00	85.188.000,00	85.188.000,00	12.480.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.286.575.000,00	1.261.575.000,00	1.145.555.000,00	-141.020.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			1.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	208.220.000,00	246.640.000,00	263.140.000,00	54.920.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			215.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya				100 %	100 %	1.198.454.000,00	1.853.966.000,00	1.997.776.000,00	799.322.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	10 Unit	197.024.000,00	220.744.000,00	220.744.000,00	23.720.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	733.560.000,00	1.145.448.000,00	1.245.448.000,00	511.888.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				74 Unit	116 Unit	267.870.000,00	487.774.000,00	531.584.000,00	263.714.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			290.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan				221.000 Ton	221.000 Ton	715.464.200,00	535.824.200,00	736.001.200,00	274.535.800,00							990.000.000,00		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	<i>Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya</i>				100 %	100 %	715.464.200,00	535.824.200,00	736.001.200,00	20.537.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin		990.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia</i>				2 Unit	2 Unit	440.000.000,00	240.000.000,00	440.000.000,00	0,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																			
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				2 Layanan	2 Layanan	275.464.200,00	295.824.200,00	296.001.200,00	20.537.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			290.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	J U M L A H								5.314.000.000,00	5.818.000.000,00	5.953.145.000,00	639.145.000,00							5.925.000.000,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP								4.986.774.700,00	4.471.349.056,00	4.343.739.056,00	-643.035.644,00						6.860.452.170,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.986.774.700,00	4.471.349.056,00	4.343.739.056,00	-643.035.644,00							6.860.452.170,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.986.774.700,00	4.471.349.056,00	4.343.739.056,00	-643.035.644,00							6.860.452.170,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Poin	100 Poin	3.226.464.500,00	3.372.240.696,00	3.263.910.696,00	322.646.450,00							3.549.110.950,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)				100 %	100 %	139.016.600,00	163.016.600,00	163.016.600,00	24.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	ASN serta Pemerintah Daerah Povinsi		152.918.260,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.016.600,00	163.016.600,00	163.016.600,00	24.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			152.918.260,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan jasa administrasi yang terpenuhi				-	100 %	75.965.800,00	75.965.800,00	75.965.800,00	0,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	ASN serta Pemerintah Daerah Povinsi		83.562.380,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	75.965.800,00	75.965.800,00	75.965.800,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			83.562.380,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	709.959.500,00	704.726.500,00	403.031.500,00	-306.928.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	ASN dan Pegawai (non ASN) serta Stakeholder		780.955.450,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.177.500,00	17.177.500,00	17.177.500,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			18.895.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57.096.000,00	57.096.000,00	57.096.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			62.805.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			2.871.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			19.030.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	615.776.000,00	610.543.000,00	308.848.000,00	-306.928.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarماسin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			677.353.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor</i>				100 %	100 %	326.350.000,00	326.100.000,00	380.100.000,00	53.750.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	ASN dan Pegawai (non ASN) serta Stakeholder		358.985.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				19 Paket	21 Paket	84.750.000,00	84.750.000,00	117.250.000,00	32.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			93.225.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	36 Unit	241.600.000,00	241.350.000,00	262.850.000,00	21.250.000,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			265.760.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelancaran tugas dan pelayanan</i>				-	100 %	936.977.400,00	1.030.867.196,00	1.170.232.196,00	233.254.796,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	ASN dan Pegawai (non ASN) serta Stakeholder		1.030.675.140,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	749.485.000,00	819.374.796,00	958.739.796,00	209.254.796,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			824.433.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	187.492.400,00	211.492.400,00	211.492.400,00	24.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			206.241.640,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana BMD kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya</i>				100 %	100 %	1.038.195.200,00	1.071.564.600,00	1.071.564.600,00	33.369.400,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	ASN dan Pegawai (non ASN) serta Stakeholder		1.142.014.720,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	176.244.000,00	180.784.000,00	180.784.000,00	4.540.000,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			193.868.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	31 Unit	502.718.000,00	538.726.600,00	538.726.600,00	36.008.600,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			552.989.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	359.233.200,00	352.054.000,00	352.054.000,00	-7.179.200,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			395.156.520,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi				221000 ton	221000 ton	1.760.310.200,00	1.099.108.360,00	1.079.828.360,00	1.551.031.020,00							3.311.341.220,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Peningkatan jumlah ikan yang didaratkan pada Pelabuhan Perikanan				100 %	100 %	1.760.310.200,00	1.099.108.360,00	1.079.828.360,00	-680.481.840,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	ASN dan Pegawai (non ASN) serta Stakeholder		3.311.341.220,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				95 Unit	6 Unit	1.479.900.000,00	806.199.160,00	806.199.160,00	-673.700.840,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			3.002.890.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				4 Layanan	4 Layanan	280.410.200,00	292.909.200,00	273.629.200,00	-6.781.000,00	Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			308.451.220,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			J U M L A H						4.986.774.700,00	4.471.349.056,00	4.343.739.056,00	-643.035.644,00							6.860.452.170,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU								3.810.000.000,00	3.217.607.000,00	3.076.695.000,00	-733.305.000,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.810.000.000,00	3.217.607.000,00	3.076.695.000,00	-733.305.000,00							0,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.810.000.000,00	3.217.607.000,00	3.076.695.000,00	-733.305.000,00							0,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				-	100 Poin	1.353.775.000,00	1.352.587.000,00	1.244.242.000,00	-1.353.775.000,00							0,00		
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)				-	100 %	41.100.000,00	39.744.000,00	39.744.000,00	-1.356.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	41.100.000,00	39.744.000,00	39.744.000,00	-1.356.000,00	Kab. Kotabaru, Pulau Laut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait				-	100 %	75.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	-6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	75.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kotabaru, Pulau Laut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan				-	100 %	331.334.100,00	351.018.000,00	280.967.000,00	-50.367.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.741.100,00	19.732.600,00	19.732.600,00	-8.500,00	Kab. Kotabaru, Pulau Laut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.669.000,00	20.852.400,00	20.852.400,00	183.400,00	Kab. Kotabaru, Pulau Laut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.815.000,00	87.006.000,00	87.006.000,00	-1.809.000,00	Kab. Kotabaru, Pulau Laut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	194.759.000,00	216.077.000,00	146.026.000,00	-48.733.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemuenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan				-	100 %	423.900.900,00	422.767.000,00	422.767.000,00	-1.133.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.900.900,00	116.767.000,00	116.767.000,00	-1.133.900,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya				-	100 %	481.840.000,00	469.458.000,00	431.164.000,00	-50.676.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	5 Unit	208.380.000,00	203.938.000,00	203.938.000,00	-4.442.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	129.240.000,00	126.092.000,00	87.798.000,00	-41.442.000,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	144.220.000,00	139.428.000,00	139.428.000,00	-4.792.000,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi				187465 ton	156627,93 ton	2.456.225.000,00	1.865.020.000,00	1.832.453.000,00	-2.456.225.000,00							0,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina				100 %	100 %	2.456.225.000,00	1.865.020.000,00	1.832.453.000,00	-623.772.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				12 Unit	12 Unit	1.860.750.000,00	1.339.545.000,00	1.249.584.000,00	-611.166.000,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				6 Unit	6 Unit	595.475.000,00	525.475.000,00	582.869.000,00	-12.606.000,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		J U M L A H								3.810.000.000,00	3.217.607.000,00	3.076.695.000,00	-733.305.000,00						0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU								1.795.851.000,00	1.514.000.000,00	1.688.700.000,00	-107.151.000,00						3.680.436.225,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.795.851.000,00	1.514.000.000,00	1.688.700.000,00	-107.151.000,00							3.680.436.225,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1.795.851.000,00	1.514.000.000,00	1.688.700.000,00	-107.151.000,00							3.680.436.225,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				-	100 %	1.197.658.000,00	1.104.424.000,00	1.228.153.000,00	1.174.840.825,00							2.372.498.825,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	100 %	39.536.000,00	46.224.000,00	46.224.000,00	6.688.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur PP Kotabaru		43.489.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39.536.000,00	46.224.000,00	46.224.000,00	6.688.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			43.489.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	12 Laporan	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	ASN PP Kotabaru		67.320.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			67.320.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur PP Kotabaru		76.579.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			38.289.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			38.289.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	215.415.700,00	157.767.500,00	200.240.700,00	-15.175.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur PP Kotabaru		749.501.185,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	5.945.300,00	3.864.000,00	3.864.000,00	-2.081.300,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			24.729.870,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	36.596.000,00	33.925.100,00	27.417.100,00	-9.178.900,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			64.250.740,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	2.040.000,00	2.030.600,00	2.030.600,00	-9.400,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			60.517.875,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	6.452.400,00	6.347.800,00	6.298.000,00	-154.400,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			24.420.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	164.382.000,00	111.600.000,00	160.631.000,00	-3.751.000,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			575.582.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	435.643.800,00	342.000.000,00	423.255.800,00	-12.388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur PP Kotabaru		840.051.080,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	342.000.000,00	342.000.000,00	416.698.000,00	74.698.000,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			580.787.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.052.000,00	0,00	2.557.800,00	-59.494.200,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			178.312.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	31.591.800,00	0,00	4.000.000,00	-27.591.800,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			80.950.980,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemuenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	297.230.500,00	321.000.500,00	321.000.500,00	23.770.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur PP Kotabaru		417.673.960,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.904.000,00	40.144.000,00	40.144.000,00	6.240.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			41.694.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			112.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	179.326.500,00	196.856.500,00	196.856.500,00	17.530.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			263.779.560,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya				100 %	100 %	148.632.000,00	176.232.000,00	176.232.000,00	27.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur PP Kotabaru		177.883.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	71.704.000,00	91.734.000,00	91.734.000,00	20.030.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			74.694.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	65.808.000,00	78.288.000,00	78.288.000,00	12.480.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			72.388.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	11.120.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	-4.910.000,00	Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			30.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi				221000 ton	221000 ton	598.193.000,00	409.576.000,00	460.547.000,00	709.744.400,00							1.307.937.400,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya				100 %	100 % 2 Layanan	598.193.000,00	409.576.000,00	460.547.000,00	-137.646.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Aparatur dan Pegguna Layanan PP Kotabaru		1.307.937.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	333.955.200,00	203.621.200,00	268.869.300,00	-65.085.900,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			820.882.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																			
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	2 Layanan	264.237.800,00	205.954.800,00	191.677.700,00	-72.560.100,00	Kab. Kotabaru, Pulauaut Utara, Stagen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan			487.054.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	J U M L A H								1.795.851.000,00	1.514.000.000,00	1.688.700.000,00	-107.151.000,00							3.680.436.225,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN							6.222.758.600,00	2.738.000.000,00	3.312.067.673,00	-2.910.690.927,00						7.144.933.900,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.222.758.600,00	2.738.000.000,00	3.312.067.673,00	-2.910.690.927,00							7.144.933.900,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							6.222.758.600,00	2.738.000.000,00	3.312.067.673,00	-2.910.690.927,00							7.144.933.900,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				100 Poin	100 Poin	4.045.371.600,00	2.222.316.000,00	2.299.942.373,00	733.879.900,00							4.779.251.500,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)				100 %	100 %	17.405.000,00	17.405.000,00	1.445.000,00	-15.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan Pengguna Pelayanan PP Batulicin		31.459.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.405.000,00	17.405.000,00	1.445.000,00	-15.960.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			31.459.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait				100 %	100 %	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur Sipil Negara PP Batulicin		65.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			65.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan				100 %	100 %	20.911.000,00	2.518.000,00	2.518.000,00	-18.393.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur Sipil Negara PP Batulicin		34.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	38 Orang	20.911.000,00	2.518.000,00	2.518.000,00	-18.393.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			34.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	554.171.500,00	235.721.900,00	256.202.900,00	-297.968.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan Pengguna Pelayanan PP Batulicin		751.484.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.139.500,00	6.139.500,00	6.139.500,00	0,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			6.139.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.000.000,00	29.671.400,00	29.671.400,00	-3.328.600,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			37.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.150.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00	-7.500.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			30.150.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	484.882.000,00	177.261.000,00	197.742.000,00	-287.140.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			677.244.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor				100 %	100 %	70.000.000,00	60.000,00	60.000,00	-69.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur Sipil Negara PP Batulicin		70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	60.000,00	60.000,00	-34.940.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan				100 %	100 %	937.908.100,00	743.775.400,00	744.006.400,00	-193.901.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Aparatur dan Pengguna Pelayanan PP Batulicin		1.068.273.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	68.808.000,00	81.058.000,00	81.058.000,00	12.250.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			68.808.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	376.800.000,00	159.121.600,00	159.121.600,00	-217.678.400,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi			433.320.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	492.300.100,00	503.595.800,00	503.826.800,00	11.526.700,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		566.145.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya				-	100 %	1.757.416.000,00	435.275.700,00	435.275.700,00	-1.322.140.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan Batulicin dan sekitarnya	2.006.958.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	93.800.000,00	98.699.700,00	98.699.700,00	4.899.700,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		93.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	1.663.616.000,00	336.576.000,00	336.576.000,00	-1.327.040.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		1.913.158.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tata Kelola pemerintahan yang baik				100 %	100 %	622.160.000,00	722.160.000,00	795.034.373,00	172.874.373,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan Batulicin dan sekitarnya	750.712.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	622.160.000,00	722.160.000,00	795.034.373,00	172.874.373,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi		750.712.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dari seluruh Kab/Kota du Provinsi (Ton)				221000 ton	221000 ton	2.177.387.000,00	515.684.000,00	1.012.125.300,00	188.295.400,00						2.365.682.400,00		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya				100 %	100 %	2.177.387.000,00	515.684.000,00	1.012.125.300,00	-1.165.261.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	Masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan Batulicin dan sekitarnya	2.365.682.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	1 Unit	1.724.863.000,00	240.000,00	494.321.300,00	-1.230.541.700,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Ukm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan		1.913.158.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	2 Layanan	452.524.000,00	515.444.000,00	517.804.000,00	65.280.000,00	Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan		452.524.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	J U M L A H								6.222.758.600,00	2.738.000.000,00	3.312.067.673,00	-2.910.690.927,00						7.144.933.900,00		

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

